



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Kaji Program DP Nol Rupiah

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membahas detail skema dan finalisasi program DP Nol Rupiah. Badan ini akan dibentuk April mendatang.

Skema pembiayaan DP Nol Rupiah merupakan kerja sama antara Pemprov DKI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyediakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hunian DP Nol Rupiah wujud penyediaan *affordable housing*. Kita bangun BLUD dengan *zerodownpayment* sebagai sebuah kebutuhan pokok," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Program DP Nol Rupiah dilatarbelakangi kurangnya hunian untuk warga yang berdomisili di Jakarta. Setidaknya dibutuhkan 302.000 unit. Apalagi sekitar 51% warga tinggal di rumah kontrakan. Bahkan sekitar 70% warga Jakarta kelas menengah kebawah.

Menurut Sandi, DP Nol Rupiah merupakan sebuah keberpihakan pada warga yang kesulitan memiliki rumah, khususnya warga yang sudah menikah. Si pemohon juga harus memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta.

"Klasifikasi *target market* kita adalah mereka yang *combine* penghasilannya maksimal Rp7 juta dan minimal gaji UMP. Kita tahu UMP Rp3,6 juta. Sektoral juga. Kalau dua-duanya aktivitas Rp7 juta, mereka masuk *target market* DP Nol Rupiah," ungkapnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, program DP Nol Rupiah saat ini baru mengakomodasi semua persyaratan yang ada dalam program FLPP milik Kementerian PUPR.

"Kalau DP-nya itu jelas bisa dari Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PDPP) pemerintah pusat, bisa juga Pemprov DKI. Untuk Pemprov DKI saya belum menyatakan sekarang ini. Nanti kita lagi godok," ujarnya.

Dalam skema FLPP, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR memberikan subsidi kepada debitur atau konsumen dengan cara menabungkan sebagian bunga dari Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Subsidi ini dibayarkan pemerintah untuk memangkas bunga dari KPR yang ditetapkan bank sehingga konsumen hanya membayar bunga sebesar 5% per tahun. Artinya sampai selesai kredit selama tenor cicilan yang disepakati penikmat program FLPP membayar cicilan secara *fixed* alias tidak mengikuti perubahan suku bunga. Untuk program FLPP maksimal tenor cicilan yang diberikan selama 20 tahun.

"BLUD baru terbentuk April dan badan itu belum bisa bekerja maksimal. Saya bilang bangunannya saja belum berdiri, bangunannya belum

tegak. Apa yang mau dicicil, apa yang mau dinonon?" kata Agustino.

Sebelumnya Pemprov DKI memastikan rumah DP Nol Rupiah berbentuk rumah susun bukan rumah tapak seperti yang dibangun di Sorotaa, Jakarta Utara. Harga jual Rp350 juta per unit itu jauh di atas batas maksimal yang ditetapkan pemerintah bagi skema kredit rumah bersubsidi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 425/KPTS/M/2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah yang Dapat Diperoleh melalui Kredit/Perbiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, batasan maksimal harga jual rumah tapak melalui KPR sejahtera di Jabodetabek pada 2018 sebesar Rp148,5 juta. Sementara itu rumah vertikal batas maksimalnya Rp316 juta 345 juta per unit.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, pada program FLPP bunga yang harus dibayarkan konsumen sekitar 5% per tahun. Sementara sisa bunga yang ditetapkan bank disubsidi dari APBN melalui Kementerian PUPR.

"Di Jakarta seperti apa? Itu lagi digodok tim Pak Agustino. Disitu akan diatur secara detail. Hari ini (kemarin) kita prinsip-prinsip dasar dulu," ucapnya.

✶ Bima Setiyadi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Kaji Program DP Nol Rupiah

MILIKI RUMAH MURAH

Pemprov DKI berkomitmen memberikan kemudahan bagi warga Jakarta dalam kepemilikan rumah melalui program DP Nol Rupiah.

PROGRAM DP NOL RUPIAH

- Upaya mewujudkan *affordable housing* (hunian yang terjangkau) sebagai salah satu kebutuhan pokok warga Jakarta.
- Kredit murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (Rp2 juta-Rp7 juta).

RUMAH DP NOL RUPIAH (KLAPA VILLAGE)

LOKASI:

Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

HARGA:

- 1 BR
Rp184,8 juta
- 2 BR
Rp316,8 juta

MASA KONSTRUKSI:

Januari 2018 - Pertengahan 2019

LUAS TANAH:

5.680 M2

KETINGGIAN:

20 lantai

PROGRES:

Januari 28 Februari 2018

- Pemasangan pagar batas
- Pemhangunan gudang dan barak pekerja
- Pengeroran akses jalan peyok dan jalan kerja

LUAS BANGUNAN:

27.150 M2

TIPE DAN LUAS:

1 BR (Studio) 21 M2
2 BR (36 M2)

JUMLAH:

1 BR sekitar 190 unit
2 BR sekitar 513 unit



PERSYARATAN PEMohon

- Warga DKI Jakarta
- Fotokopi e-KTP
- Fotokopi KK
- Usia minimal 21 tahun dan sudah berkeluarga
- Belum memiliki rumah
- Belum pernah menerima subsidi perolehan rumah
- Rukri masa kerja atau usaha minimal 1 tahun
- SPT Pajak Penghasilan
- Bukti penghasilan dalam satu keluarga tak melebihi batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah

(Rp7 juta)